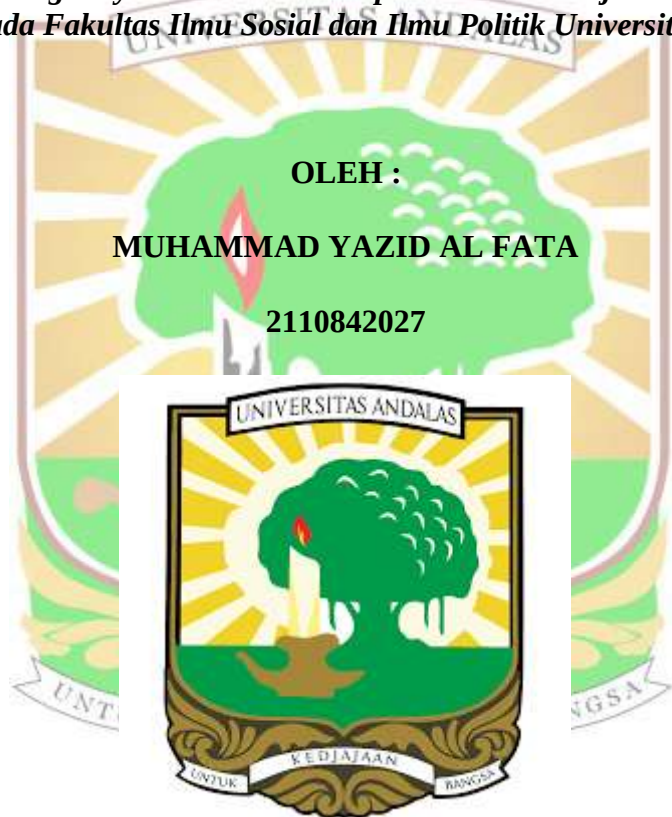


**IMPLEMENTASI PROGRAM BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) DI KOTA PADANG
TAHUN 2024**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas***



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Muhammad Yazid Al Fata, 2110842027, Implementasi Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Padang Tahun 2024, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2025. Dibimbing Oleh Drs. Yosrizal. M.Si dan Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA. Skripsi ini Terdiri dari 133 Halaman dengan referensi 9 buku teori, 1 buku metode, 10 jurnal, 1 peraturan menteri, 2 Peraturan Daerah, dan 4 website internet.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi BBGRM di Kota Padang. Program BBGRM merupakan kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai sarana peningkat angka partisipasi serta kepedulian masyarakat kepada pembangunan dalam bentuk infrastruktur maupun dalam bentuk pemberdayaan melalui semangat gotong royong.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil teori implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam penggunaannya untuk kerangka analisis. Teori ini terdiri dari enam variabel yang dianalisis: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana kebijakan.

Hasil yang didapat dari dijalankannya penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa meskipun program BBGRM sudah dijalankan pada seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah serta pelibatan berbagai elemen masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, yang sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya sifat individualisme di kalangan warga kota serta melemahnya kesadaran kolektif akan pentingnya gotong royong sebagai bagian dari budaya sosial. Masyarakat cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari program BBGRM juga turut meminimalkan antusiasme warga. Di sisi lain, faktor internal seperti lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, birokrasi yang lamban, serta keterbatasan sumber daya baik dari segi anggaran maupun tenaga teknis turut menjadi penghambat tercapainya tujuan program secara optimal. Hal ini berdampak pada tidak meratanya pelaksanaan kegiatan di setiap kelurahan, serta rendahnya efektivitas program dalam membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas hasil pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi yang intensif dan transparan antar pihak terkait, pelibatan masyarakat secara lebih aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lokal lainnya menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan untuk mewujudkan implementasi BBGRM yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Padang.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, BBGRM, gotong royong, partisipasi masyarakat, Kota Padang.

ABSTRACT

Muhammad Yazid Al Fata, 2110842027, Implementation of the Community Mutual Cooperation Service Month (BBGRM) Program in Padang City in 2024, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2025. Supervised by Drs. Yosrizal, M.Si and Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA. This thesis consists of 133 pages and includes references from 9 theoretical books, 1 methodology book, 10 journals, 1 ministerial regulation, 2 regional regulations, and 4 websites.

This study aims to analyze the implementation of the Community Mutual Cooperation Service Month Program (BBGRM) in Padang City. BBGRM is a government policy designed to increase public participation and awareness in development through the spirit of mutual cooperation.

This research uses a descriptive qualitative approach and employs the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn as the analytical framework. Six variables are examined: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, socio-economic and political conditions, and the disposition of implementers.

The research findings indicate that although the BBGRM program has been implemented across all sub-districts in Padang City with support from the local government and involvement of various community elements, its execution still faces several significant challenges. One of the main issues is the low level of public participation, largely due to the growing sense of individualism among urban residents and the weakening of collective awareness regarding the importance of mutual cooperation as a part of social culture. People tend to focus more on personal interests rather than actively engaging in community-based development activities. Furthermore, the lack of understanding about the objectives and benefits of the BBGRM program exacerbates the lack of public enthusiasm. On the other hand, internal factors such as weak inter-agency coordination, slow bureaucracy, and limited resources both in terms of budget and technical personnel also hinder the optimal achievement of the program's goals. These obstacles result in uneven implementation across neighborhoods and reduce the program's effectiveness in fostering a sense of ownership and shared responsibility for development outcomes. Therefore, strengthening intensive and transparent communication among all involved parties, ensuring active community involvement from the planning to the evaluation stages, and enhancing cross-sector coordination between the government, community organizations, and local stakeholders are crucial aspects that must be prioritized to realize a more effective, inclusive, and sustainable implementation of the BBGRM program in Padang City.

Keywords: Policy implementation, BBGRM, mutual cooperation, community participation, Padang City.